

BAHAN AJAR

**STRUKTUR SOSIAL :
LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

Mata kuliah **Struktur dan Proses Sosial**

Jurusan Pendidikan Sejarah

FPIPS UPI Bandung

Oleh :

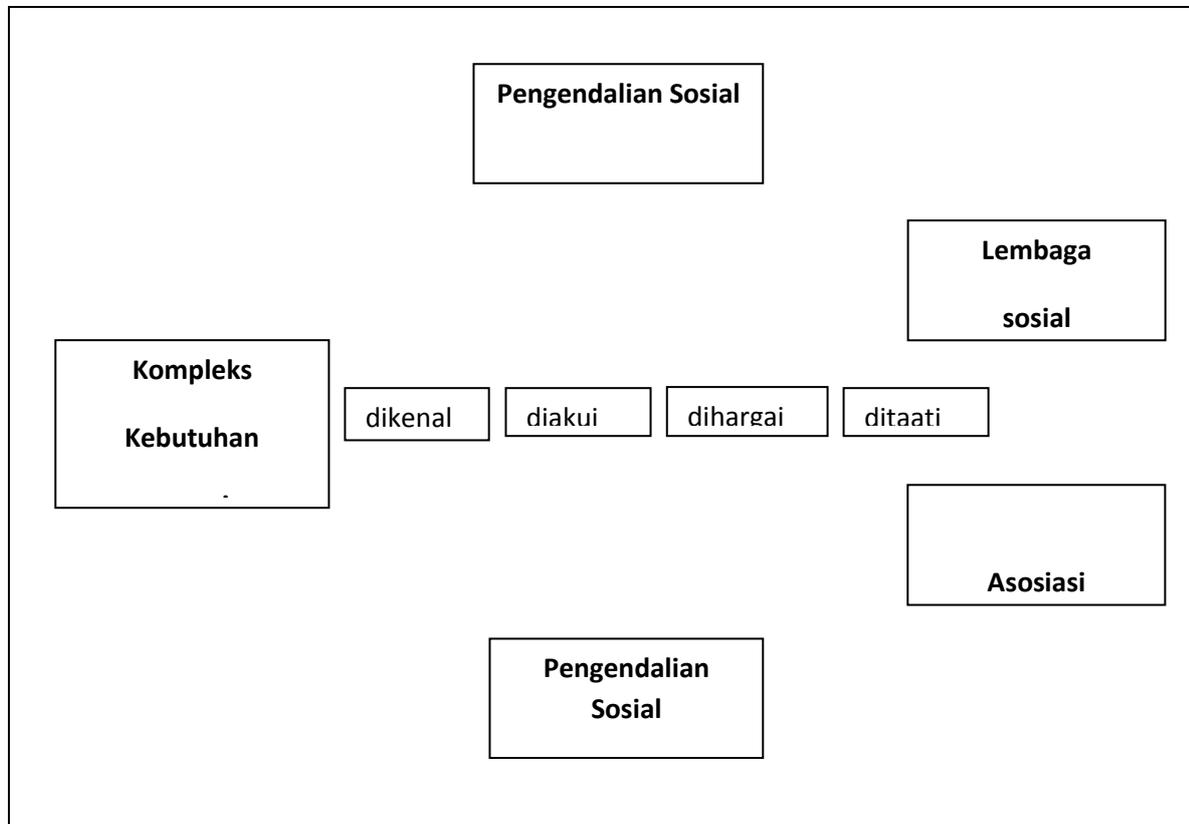
Drs. Syarif Moeis

NIP : 131 811 175



**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG 2008**

Peta konsep



1. Pendahuluan

Salah satu unsur penting dari kajian tentang struktur sosial adalah lembaga kemasyarakatan, namun pembahasan tentang lembaga kemasyarakatan dalam bagian ini sifatnya tidak menyeluruh, tetapi hanya sekedar pengantar yang menyangkut hal-hal pokok saja, mengingat pada bagian berikutnya, kajian tentang lembaga kemasyarakatan ini akan dibahas secara terperinci; maksud penulisannya yaitu untuk menggambarkan satu bagian dari struktur sosial sehingga kajiannya menjadi utuh.

Unsur penting lain dari struktur sosial adalah apa yang disebut sebagai lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan juga biasa disebut dengan institusi sosial sebagai pengertian dari konsep awal *social institutions*, yaitu sebagai himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat; Koentjaraningrat

(1996) mengartikan social institutions ini sebagai pranata sosial, yaitu sebagai suatu sistem norma khusus yang menata serangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan yang khusus dalam kehidupan masyarakat. Dalam bahasa sehari-hari istilah institution sering dikacaukan dengan institute, dalam pengertian Koentjaraningrat di atas institution diartikannya sebagai pranata, sedangkan institute diartikan sebagai lembaga; namun dalam sosiologi, pengertian konsep itu tidak demikian walaupun substansinya sebenarnya sama. Soerjono Soekanto (1998) mengartikan institution sebagai lembaga dan institute sebagai *asosiasi*, untuk selanjutnya buku ini lebih mengacu terhadap apa yang dikemukakan oleh Soekanto di atas.

Kalau mengacu pada apa yang dikatakan W.G. Sumner (1940) dengan karangannya yang cukup terkenal "*folkways*", dia mengatakan bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan menjadi adat istiadat, yang kemudian berkembang menjadi tata kelakuan (*mores*) dan akan bertambah matang apabila telah diadakan penjabaran terhadap aturandan perbuatan; pada saat itu terbentuklah suatu struktur (yaitu suatu sarana atau struktur peranan), dan sempurnalah lembaga tersebut. Kebiasaan dan tata kelakuan, merupakan cara-cara bertingkah laku yang lebih bersifat habitual dan kadang-kadang tidak didasarkan pada penalaran. Kemudian Sumner beranggapan, bahwa suatu lembaga bukan merupakan aksi atau kaidah, akan tetapi suatu kristalisasi dari perangkat kaidah-kaidah, yang selanjutnya mengacu pada organisasi-organisasi abstrak maupun konkrit; dia menganggap perkawinan sebagai lembaga yang tidak sempurna, oleh karena tidak berstruktur, akan tetapi keluarga merupakan suatu lembaga.

Lembaga kemasyarakatan ini selalu melekat dalam kehidupan masyarakat, tidak dipersoalkan apakah bentuk masyarakat itu masih sederhana ataupun telah maju; setiap masyarakat sudah tentu tidak akan terlepas dengan kompleks kebutuhan atau kepentingan pokok yang apabila dikelompok-kelompokkan, terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan, dan wujud konkrit dari lembaga sosial disebut *asosiasi*. Sebagai contoh, Universitas merupakan lembaga kemasyarakatan, sedangkan Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada, atau Universitas Airlangga adalah contoh asosiasi. Selain kegunaan seperti di atas, lembaga kemasyarakatan memuat arti penting dalam masyarakat, yaitu mengkondisikan keteraturan dan menjaga integrasi dalam masyarakat; yang secara umum Soekanto mengemukakan bahwa lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia itu pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana seharusnya mereka bertingkah-laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakatnya, terutama yang menyangkut berbagai kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*); artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah-laku anggota-anggotanya.

2. Pelembagaan

Erat hubungannya dengan lembaga sosial, yaitu proses pelembagaan (*institutionalization*), oleh karena pada hakekatnya suatu lembaga sosial mencakup himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia. Proses pelembagaan yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan; dalam arti bahwa norma kemasyarakatan itu dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Suatu norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial tertentu, belum tentu berlaku pada sistem sosial lainnya; misalnya, poligami diperkenankan dalam suatu masyarakat Islam, akan tetapi dilarang dalam masyarakat Katolik. H.M. Johnson (Sunarto, 2004) mengatakan bahwa suatu norma akan terlembaga (*institutionalized*) dalam suatu sistem sosial tertentu, apabila paling sedikit memenuhi tiga syarat, yaitu :

1. bagian terbesar dari warga suatu sistem sosial menerima norma-norma tersebut,
2. norma-norma tersebut telah menjiwai bagian terbesar warga-warga sistem sosial tersebut,
3. norma tersebut bersanksi.

selain itu, maka perlu pula difahami aspek-aspek lain dari pelembagaan tersebut yang mencakup hal-hal, sebagai berikut :

1. norma-norma yang terlembaga berlaku bagi warga-warga sistem sosial sesuai dengan posisi sosialnya di dalam sistem sosial tersebut
2. ada berbagai derajat penjiwaan (*'internalization'*) pada warga-warga sistem sosial tersebut,
3. luasnya penyebaran norma-norma tadi juga menyangkut derajat-derajat tertentu.

Konformitas dan penyimpangan

Konformitas atau conformity berarti penyesuaian diri dengan masyarakat, dengan cara mengindahkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat; dalam bahasa umum, konformitas ini dikenal dengan *keselarasan*, selaras dalam hubungannya dengan manusia lain, alam lingkungan, dan alam spiritual, keselarasan terhadap norma-norma yang melembaga dianggap sebagai hal yang wajar; seorang warga masyarakat yang telah menjiwai norma-norma biasanya merasakan adanya kebutuhan tertentu untuk melakukan konformitas. Biasanya hati nuraninya akan terganggu, apabila dia tidak melakukan konformitas; walaupun dia tidak melakukan hal itu, maka warga masyarakat lainnya sudah siap untuk mencela.

Kegagalan untuk berkonformitas biasanya mengakibatkan terjadinya penjatuhan hukum, akan tetapi efektivitas hukum tersebut berbeda-beda sesuai dengan kedudukan sosial dari pihak yang dijatuhi hukuman tersebut. Sebenarnya, baik bagi orang yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi maupun rendah, sama-sama kehilangan prestise, apabila tidak mematuhi norma-norma. Akan tetapi, seseorang yang tinggi kedudukannya akan lebih menderita lagi, oleh karena pada umumnya dia mulai dari serajat konformitas yang relatif tinggi; suatu penyimpangan sedikitpun akan menyebabkan terjadinya reaksi yang negatif (Merton, 1967).

Gagasan-gagasan yang sama sebenarnya dapat disajikan secara berbeda, warga-warga suatu kelompok akan saling menilai perilaku dari sesama rekannya, dengan mempergunakan norma kelompok sebagai patokan. Didalam proses kehidupan bersama yang cukup lama, masing-masing anggota kelompok menjadi obyek penilaian dari pihak-pihak dengan siapa dia mengadakan interaksi; selanjutnya, dia mendapatkan reputasi yang populer atau tidak populer, dimana penilaian mungkin datang dari orang-orang yang belum pernah dilihatnya. Apalagi gejala-gejala tersebut sudah mapan, maka sampai batas-batas tertentu norma-norma kelompok mengalami modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan warga untuk siapa norma itu berlaku. Hal itu antara lain berarti bahwa seseorang dengan reputasi sebagai orang yang tidak mempunyai kemampuan, tidak akan diharapkan menjadi orang yang mempunyai kemampuan atau mungkin hanya diakui sebagai pihak yang mempunyai kemampuan sedikit saja.

Sebagai akibatnya, maka tidaklah akan dijatuhi hukuman berat apabila dia agak menyimpang, dia akan diperlakukan seperti biasanya; namun tidak demikian halnya dengan pihak-pihak yang mempunyai reputasi yang lebih baik. Oleh karena itu, maka sanksi-sanksi hendaknya tidak ditafsirkan sebagai imbalan hukuman yang tetap atau pasti bagi perilaku-perilaku tertentu.

Bertapapun melembaganya suatu norma, akan tetapi kadang-kadang terjadi juga penyimpangan-penyimpangan, hal itu terbukti dengan bereksistensinya sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi tersebut berkaitan dalam semua bentuk pengendalian sosial, yaitu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari norma-norma yang telah melembaga. Akan tetapi hal itu bukanlah berarti, bahwa efektivitas sanksi semata-mata tergantung dari penerapannya. Salah satu aspek terpenting dari interaksi sosial adalah, bahwa setiap pihak atau aktor mampu menduga apakah yang merupakan tanggapan terhadap aksinya. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan, bahwa pihak-pihak yang akan melakukan penyimpangan-penyimpangan akan melakukan mawas diri atau mengendalikan dirinya; mereka tidak akan berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi reaksi terhadap suatu pelanggaran, oleh karena mereka sudah mengetahuinya. Pengendalian diri tersebut juga merupakan suatu bentuk pengendalian sosial, sebagaimana halnya penerapan sanksi-sanksi.

Kehidupan pada komunitas kota agaknya lebih memberikan kelonggaran penyimpangan norma-norma itu, karena anggota-anggotanya selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelompoknya. Penduduk kota terdiri dari berbagai macam manusia dengan berbagai latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda pula. Lagi pula kota merupakan pintu gerbang masuknya pengaruh-pengaruh

dari luar; peralatan modern di bidang komunikasi massa, memungkinkan orang-orang kota mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi diluar batas-batas daerahnya. Dengan demikian, tidak mengherankan kalau kaidah-kaidah yang berlaku pada komunitas kota selalu mengalami perkembangan dan perubahan.

Keadaan ini pula yang menyebabkan keberlakuan konformitas pada penduduk kota, terutama di kota-kota besar, sangat kecil; hal mana sangat berpengaruh terhadap proses pelembagaan nilai-nilai, yang agaknya sukar untuk terjadi kalau dibandingkan dengan penduduk desa; bahkan suatu konformitas di kota-kota besar sering kali dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Sebaliknya, dalam kehidupan komunitas desa, suatu penyimpangan atau deviasi bukan selalu berarti negatif; sejauh proses penyimpangan itu dianggap bermanfaat, maka penyimpangan itu akan diterima. Biasanya proses tersebut dimulai oleh generasi muda yang pernah pergi merantau dan mereka dianggap berhasil dalam perantauannya; kebiasaan-kebiasaannya yang dibawa dari luar mulai ditiru oleh orang-orang sekitarnya untuk kemudian menjalar ke seluruh masyarakat, contohnya menanamkan disiplin dan penghargaan akan waktu.

3. Pengendalian Sosial (Social Control)

Pengendalian sosial sebenarnya sudah ada, semenjak awal kehidupan manusia. Pada bentuk pergaulan hidup yang paling sederhana, pengendalian sosial merupakan suatu sarana untuk mengorganisasikan perilaku sosial dan budaya. Sejak lahir sampai mati, manusia dikenakan pengendalian sosial tertentu, yang kadang-kadang tidak disadarinya. Pengendalian sosial diartikan sebagai suatu proses, baik direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

3.1. Pengendalian Sosial : kelompok dan individu

Pengendalian sosial terjadi apabila suatu kelompok berusaha menentukan perilaku kelompok lain, atau apabila suatu kelompok mengendalikan perilaku anggota-anggotanya, atau apabila pribadi-pribadi mempengaruhi tanggapan dari pihak-pihak lainnya. Dengan demikian, maka pengendalian sosial berproses pada tiga derajat yaitu kelompok terhadap kelompok lainnya, kelompok terhadap anggota-anggotanya, dan pribadi terhadap pribadi lainnya. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa pengendalian sosial terjadi apabila seseorang harus berbuat (atau tidak berbuat) sesuai dengan keinginan pihak lain, yang sesuai dengan kepentingannya ataupun tidak.

Pengendalian sosial haruslah dibedakan dengan pengendalian diri, walaupun keduanya berhubungan erat. Pada taraf individual, maka pengendalian sosial mengacu pada usaha untuk mempengaruhi pihak lain, sedangkan pengendalian diri tertuju pada diri pribadi sesuai dengan gagasan atau tujuan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Sudah tentu bahwa tujuan-tujuan tersebut biasanya ditentukan oleh nilai-nilai, norma-norma maupun kebiasaan

yang berlaku dalam kelompok. Dalam hal ini, maka tidaklah mustahil bahwa pengendalian diri itu berasal dari pengendalian sosial.

3.2. Kepemimpinan dan Pengendalian Sosial

Hendaknya pengendalian sosial ini tidak dicampur-adukan dengan kepemimpinan pribadi. Apabila seseorang berusaha untuk mengendalikan perilaku fihak-fihak lain, maka biasanya ada anggapan kuat bahwa dia menerapkan jenis kepemimpinan tertentu. Akan tetapi kalau seseorang berhasil mengumpulkan beberapa orang dan berusaha untuk mempengaruhi kelompok yang lebih besar, maka dikatakan bahwa dia bertindak sebagai pelopor pengendalian sosial. Kepemimpinan kadang-kadang digunakan juga dalam arti bahwa kegiatan melakukan pengendalian sosial adalah selaras dengan keinginan sendiri maupun nilai-nilai yang dianut.

3.3. Antara dua studi : Sosiologi dan Psikologi Sosial

Studi terhadap pengendalian sosial merupakan suatu aspek yang penting dari sosiologi dan psikologi sosial, akan tetapi tidaklah sama luasnya dengan kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut. Sosiologi memberikan tekanan pada pola perilaku kelompok serta interaksi antara kelompok dan individu sedangkan psikologi sosial mempelajari aspek-aspek intelektual dan individu dari tanggapan pribadi terhadap perilaku fihak lainnya.. Pengendalian sosial berkaitan erat dengan sosiologi dan psikologi sosial sebagai topik yang sangat penting dalam kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut. Cabang-cabang ilmu lainnya juga memberikan kontribusi, seperti misalnya antropologi budaya, yang menyajikan data perihal aturan-aturan dan nilai-nilai masyarakat sederhana, serta menambang obyektivitas studi-studi terhadap peradaban kontemporer. Oleh karena itu, maka pengendalian sosial merupakan konsepsi yang menyangkut berbagai ilmu pengetahuan, yang sekaligus menyatukan studi-studi terhadap perilaku manusia.

3.4. Tujuan-tujuan

Penetapan tujuan-tujuan yang ada pada penerapan pengendalian sosial agaknya cukup rumit, kalau mengambil motivasi para guru sebagai contoh, mungkin bisa menggambarkan betapa rumitnya suatu pengendalian sosial itu. Semua guru adalah pelopor-pelopor pengendalian sosial, akan tetapi tidaklah terlalu mudah untuk mengadakan kategorisasi terhadap motif-motifnya. Guru tertentu merasakan adanya kepuasan tertentu, apabila dapat mengendalikan perilaku fihak-fihak lain; kadang-kadang mereka mempergunakannya sebagai suatu penyaluran rasa ketidak-puasan terhadap kebiasaan, norma dan nilai yang ada. Tidak jarang pula, bahwa para guru menerapkan pola-pola lama, tanpa mencoba mengadakan penyesuaian dengan perkembangan-perkembangan yang telah terjadi. Akan tetapi, ada juga yang dengan tekun untuk senantiasa berusaha mengadakan penyesuaian-penyesuaian dengan

kebutuhan masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan petunjuk, betapa rumitnya motif-motif yang ada di balik suatu pengendalian sosial.

3.5. Operasional Pengendalian Sosial

Kiranya perlu dicatat, bahwa pentingnya lembaga-lembaga ataupun sarana-sarana pengendalian sosial, senantiasa tergantung pada konteks sosial-budaya, dimana pengendalian sosial tersebut beroperasi. Disuatu masyarakat pedesaan yang homogen, misalnya desas-desus merupakan cara yang ampuh untuk memaksakan terjadinya konformitas; namun tidak demikian halnya dengan masyarakat perkotaan yang heterogen. Mungkin yang lebih efektif, di tempat lain adalah pengendalian sosial yang dilakukan secara bertahap terhadap anak-anak, remaja, dan seterusnya. Kekuatan dan daya cakup pengendalian sosial dapat pula didasarkan pada rasa keterasingan dari seseorang, namun dibalik itu dia masih merasa terikat pada pengendalian sosial yang berlaku. Efektivitas pengendalian sosial juga senantiasa tergantung pada perubahan-perubahan organisasi sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perwujudan yang paling jelas dan seragam dari pengendalian sosial dapat ditemukan pada lembaga-lembaga sosial. Lembaga-lembaga sosial selalu ada pada setiap masyarakat, oleh karena fungsinya sebagai stabilisator masyarakat. Lembaga-lembaga itu juga memberikan pola tertentu untuk mengadakan perubahan secara teratur, serta mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang terus menerus, atau berkesinambungan.

4. Bentuk-bentuk umum Lembaga Kemasyarakatan

Dari sudut pandang kompleks atau sederhananya suatu lembaga kemasyarakatan atau menentukan berapa banyak atau besar lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dalam satu masyarakat, sebenarnya sukar untuk diukur, karena hal ini tergantung dari sifat kompleks atau sederhananya kebudayaan suatu masyarakat. Makin besar dan kompleks perkembangan suatu masyarakat, makin banyak pula jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada. Namun untuk menentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok, sekurangnya setiap masyarakat memiliki delapan buah lembaga kemasyarakatan berdasarkan fungsi untuk memenuhi keperluan hidupnya, yaitu yang menyangkut lembaga :

1. *kekerabatan* yang disebut juga sebagai kinship institutions, antara lain mencakup lembaga perkawinan, tolong menolong antar kerabat, pengasuhan anak, sopan santun pergaulan antar kerabat, dan lain-lain.
2. *ekonomi* (produksi, mengumpulkan dan mendistribusikan hasil produksi, dan lain-lain), antara lain mencakup pertanian, peternakan, berburu, industri, perbankan, koperasi, dan sebagainya,

3. *Pendidikan*, yaitu yang menyangkut pengasuhan anak, berbagai jenjang pendidikan, pemberantasan buta huruf, perpustakaan umum, pers, dan sebagainya.
4. *Ilmu pengetahuan*, meliputi pendidikan, penelitian, metodologi ilmiah, dan sebagainya,
5. *Keindahan dan rekreasi*, menyangkut berbagai cabang kesenian, olah raga, kesusateraan, dan sebagainya,
6. *Agama*, menyangkut peribadatan, upacara, semedi, penyiaran agama, doa, kenduri, ilmu gaib, ilmu dukun, dan sebagainya,
7. *Kekuasaan*, menyangkut pemerintahan, kepartaian, demokrasi, ketentaraan dan sebagainya,
8. *Kesehatan atau kenyamanan*, menyangkut kecantikan dan kesehatan, kedokteran, pengobatan tradisional, dan sebagainya.

Penggolongan tersebut di atas tentu belum lengkap, karena di dalamnya belum tercakup semua jenis lembaga kemasyarakatan yang mungkin terdapat dalam suatu masyarakat. Hal-hal seperti kejahatan, prostitusi, banditisme, dan lain-lain, juga merupakan lembaga kemasyarakatan. Disamping itu juga ada lembaga kemasyarakatan yang memiliki sangat banyak aspek, sehingga mereka juga dapat ditempatkan di dalam lebih dari satu golongan. Feodalisme, yang menciptakan suatu sistem hubungan antara pemilik tanah dan penggarap, yang sebenarnya menyebabkan terjadinya produksi dari hasil bumi, dapat dianggap sebagai lembaga ekonomi; tetapi sebagai suatu sistem hubungan antara pihak yang berkuasa dengan pihak yang dikuasai, feodalisme dapat dianggap sebagai lembaga politik.

Selain itu dalam suatu masyarakat terdapat banyak lembaga yang tidak secara khusus tumbuh dari dalam adat-istiadat masyarakat yang bersangkutan, melainkan yang secara tidak disadari ataupun secara terencana diambil dari masyarakat lain, seperti misalnya demokrasi parlementer, sistem kepartaian, koperasi, perguruan tinggi, dan lainnya. Lembaga asing itu pada umumnya hanya dapat bertahan apabila lembaga-lembaga itu dapat diselaraskan dengan lembaga-lembaga yang ada, kecuali apabila kegunaannya dapat disadari dan difahami sepenuhnya oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Horton, Paul B.- Hunt, Chester L. (1992). *Sosiologi*, (terj.). edisi keenam, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Johnson, Doyle Paul. (1986). *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, terj. Jilid 1 – 2. Jakarta: PT Gramedia Indonesia
- Haviland, William A. (1988). *Antropologi*. (terj.). Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Koentjaraningrat. (1996). *Pengantar Antropologi*; Jakarta: Rineka Cipta.
- Merton, Robert K.. (1967). *Social Theory and Social Structure*. New York : The Free Press.
- Nasikun. (1993). *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sanderson, (2000) *Sosiologi Macro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. (1998). *Sosiologi Suatu Pengantar*; Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Sturktur Sosial*, Jakarta: CV Rajawali.
- Soemardjan, Selo-Soemardi, (1974). *Setangkai Bunga Sosiologi*; Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.